



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PELAKSANAAN SOSIALIASI DAN DESIMINASI BERDASARKAN
INPRES 6 TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENINGKATAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19**

Tanjung Pinang, 16 NOVEMBER 2020



5 TUGAS MENTERI DALAM NEGERI DALAM INPRES NOMOR 6 TAHUN 2020

1. SOSIALISASI

Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

2. PEDOMAN TEKNIS

Memberikan pedoman teknis kepada Pemda Provinsi dan Pemda kab/kota dalam menyusun peraturan gubernur/peraturan bupati/ wali kota.

3. PENDAMPINGAN

Memberikan pendampingan penyusunan peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota

4. KOORDINASI & SINKRONISASI

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di Daerah

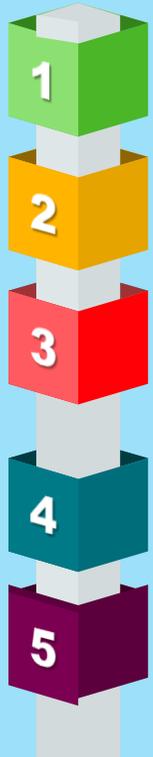
5. PELAPORAN

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menkopolhukam min. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan



IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS MENDAGRI

PELAKSANAAN SOSIALISASI



Melakukan Pengarahan Kepada Satuan Tugas Penanganann Covid 19 (Kunker)

Melakukan Sosialisasi Gerakan Sejuta Masker Di Daerah

Melakukan Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah Pada Tanggal 25 Agustus 2020

Rakor Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah dengan stake holder terkait (BPBD, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Biro Hukum, Asisten Bidang Pemerintahan Pada Tanggal 28 Agustus 2020

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Implementasi Tugas Tim Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah Tanggal 2 September 2020

SOSIALISASI GERAKAN SEJUTA MASKER



8 JULI 2020

Pembagian masker di
Kab. Gowa
Provinsi Sulawesi Selatan

1,2

JUTA MASKER

5 AGUSTUS 2020

Pembagian masker di
Kab. Indramayu
Provinsi Jawa Barat

2,5

JUTA MASKER

6 AGUSTUS 2020

Pembagian masker di
Kab. Rejang Lebong
Provinsi Jawa Barat

2,5

JUTA MASKER

7 AGUSTUS 2020

Pembagian masker di
Kab. Malang
Provinsi Jawa Timur

26

JUTA MASKER

13 AGUSTUS 2020

Pembagian masker di
Kab. Depok
Provinsi Jawa Barat

1

JUTA MASKER

15 AGUSTUS 2020

Pembagian masker di
Kab. Kuningan
Provinsi Jawa Barat

4,6

JUTA MASKER

25 AGUSTUS 2020

Pembagian masker di
Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat

1

JUTA MASKER

10 November 2020

Pembagian masker di
Di Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau
Oleh Mendagri dan Pjs. Gubernur

5

JUTA MASKER



PENYUSUNAN REGULASI DAN PEDOMAN TEKNIS UNTUK PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH

- 1. Permendagri No. 20 Tahun 2020** ttg Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemda;
- 2. Inmendagri No. 1 Tahun 2020** ttg Pencegahan Penyebaran & Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemda;
- 3. Inmendagri Nomor 4 Tahun 2020** Tentang pedoman teknis penyusunan perkara dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan
- 4. SKB Mendagri dan Menkeu No.119/2813/SJ-177/ KMK. 07/2020** tanggal 9 April 2020 ttg Percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan *Covid-19* serta Pengaman daya beli masyarakat dan perekonomian nasional; dan
- 5. SE Mendagri No. 440/3184/SJ** ttg Dukungan Terhadap Verifikasi dan Validasi Data dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.



Diterbitkan 3 (tiga) Pedoman bagi Pemda dalam Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 meliputi Aspek:

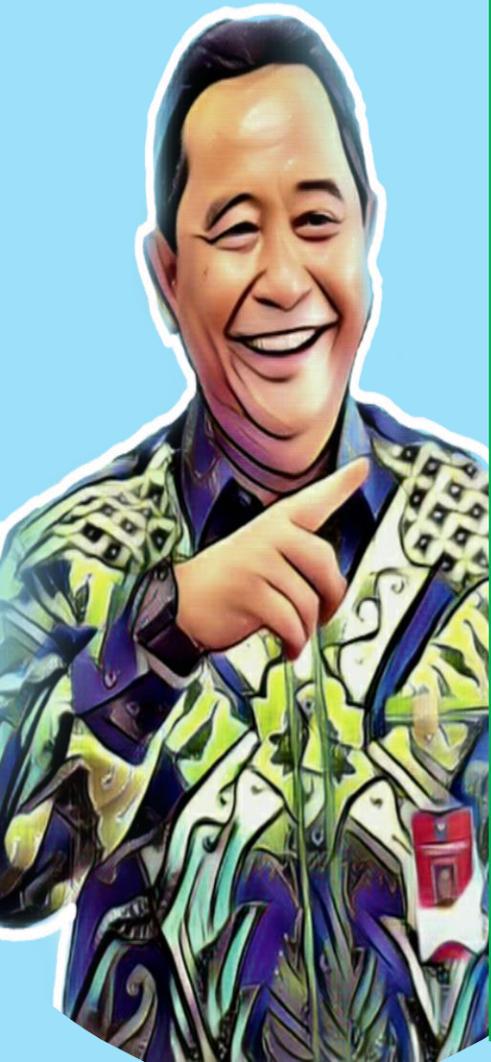
1. Kesehatan
2. Kesiapan Badan Usaha dan Masyarakat,
3. Protokol Publik dan Tahapannya dan
4. Tahapan Pemulihan Ekonomi

6. INMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protocol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah (*Tinjut Inpres 6 Tahun 2020*)

Diterbitkan SE Mendagri Nomor 440/3160/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Seluruh Indonesia. Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia diminta untuk melakukan:

1. Sosialisasi berjenjang sampai tingkat RT
2. Mendorong terobosan kebijakan penanganan Covid-19
3. Menyiapkan regulasi ttg Protokol Kesehatan di daerah dengan sanksi administratif.

FASILITASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEPADA PEMERINTAH DAERAH



1. Tanggal 25 Agustus 2020

Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah. Jumlah peserta 60 orang

2. Tanggal 28 Agustus 2020

Rakor Tim Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah dengan stake holder terkait (BPBD, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Biro Hukum, Asisten Bidang Pemerintahan) Jumlah peserta 264 orang

3. Tanggal 2 September 2020

Rapat koordinasi pelaksanaan tugas dan implementasi tugas Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah. Jumlah peserta 60 orang

4. Tanggal 16 September 2020

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 dan belum menyusun Perkada tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*

KEMENDAGRI MENDORONG PELAKSANAAN RAKOR PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI 270 DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 MELALUI SURAT NOMOR: 440/5113/SJ TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 September 2020

Nomor : 440/5113/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Rakor
Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan di Daerah

Yth. (daftar terlampir)
di-
Tempat

Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah dan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah, dengan hormat disampaikan kepada Saudara/i hal – hal sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum terkait Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Rangka Sukses Pilkada Serentak 2020 Aman dari Covid 19 dengan melibatkan Forkopimda, KPU, Bawaslu, Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanganan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan dan Biro/Bagian Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Dalam pelaksanaan rapat dimaksud memuat materi:
 - a. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020. Tentang Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- b. Pencegahan dan Deteksi Kerawanan Penularan Covid-19;
 - c. Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
3. Pelaksanaan rapat koordinasi tersebut agar dilaksanakan paling lambat hari Jumat tanggal 18 September 2020; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dimaksud melalui Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Tim Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Saudara Sahrulyadi No. Hp. 0811860211 dan Saudara Nugroho No. Hp. 082137353934.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Yth. Kepala Badan Intelijen Negara;
6. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
8. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
9. Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
10. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia.

POIN PENTING SURAT PELAKSANAAN RAKOR:

UNSUR YANG DILIBATKAN DALAM SOSIALISASI

Anggota Forkopimda

Kpud Dan Bawaslu

Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri

Badan/Kantor Kesbangpol

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanganan Bencana Daerah

Dinas Kesehatan Dan Opd Terkait Lainnya

MATERI

Sosialisasi PKPU Nomor
10 Tahun 2020 & Per
Bawaslu Nomor 4 Tahun
2020

Pencegahan dan Deteksi
Kerawanan Penularan
Covid 19

Koordinasi Penegakan
Hukum Protokol
Kesehatan

**DATA PENYUSUNAN PERKADA DAN PELAKSANAAN RAKOR
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA PENINGKATAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19**

DATA UPDATE, 19 Oktober 2020

UPDATE DATA PENYUSUNAN PERKADA TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH



TANGGAL 18 OKTOBER 2020
PUKUL 21.30 WIB



SUMBER DATA

DIOLAH DARI TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID 19 DI DAERAH

KAB/KOTA YANG BELUM MENYUSUN TERSEBAR DI 4 PROVINSI
Aceh, Sulut, Papua Barat, Papua



DAERAH YANG BELUM MENYUSUN PERKADA

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

WILAYAH SUMATERA

Prov. NAD

22 SELESAI	Banda Aceh Lhoksumawe , Aceh Tenggara, Kota Sabang,, Aceh Timur, Pidie, Aceh Besar, GayoLues Bener Meriah, Aceh Tengah, , Aceh Barat, Bireuen, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Aceh Singkil, langsa, Aceh Jaya, Aceh Utara, Kota Subulussalam
1 PROSES	Sieumelue

Prov. Sumut

33 SELESAI SEMUA

Prov. Kepri

7 SELESAI SEMUA

Prov. Sumbar

19 SELESAI SEMUA



Prov. Riau

12 SELESAI SEMUA

Prov. Bengkulu

10 SELESAI SEMUA

Prov. Jambi

11 SELESAI SEMUA

Prov. Lampung

15 SELESAI SEMUA

Prov. Babel

7 SELESAI SEMUA

Prov. Sumsel

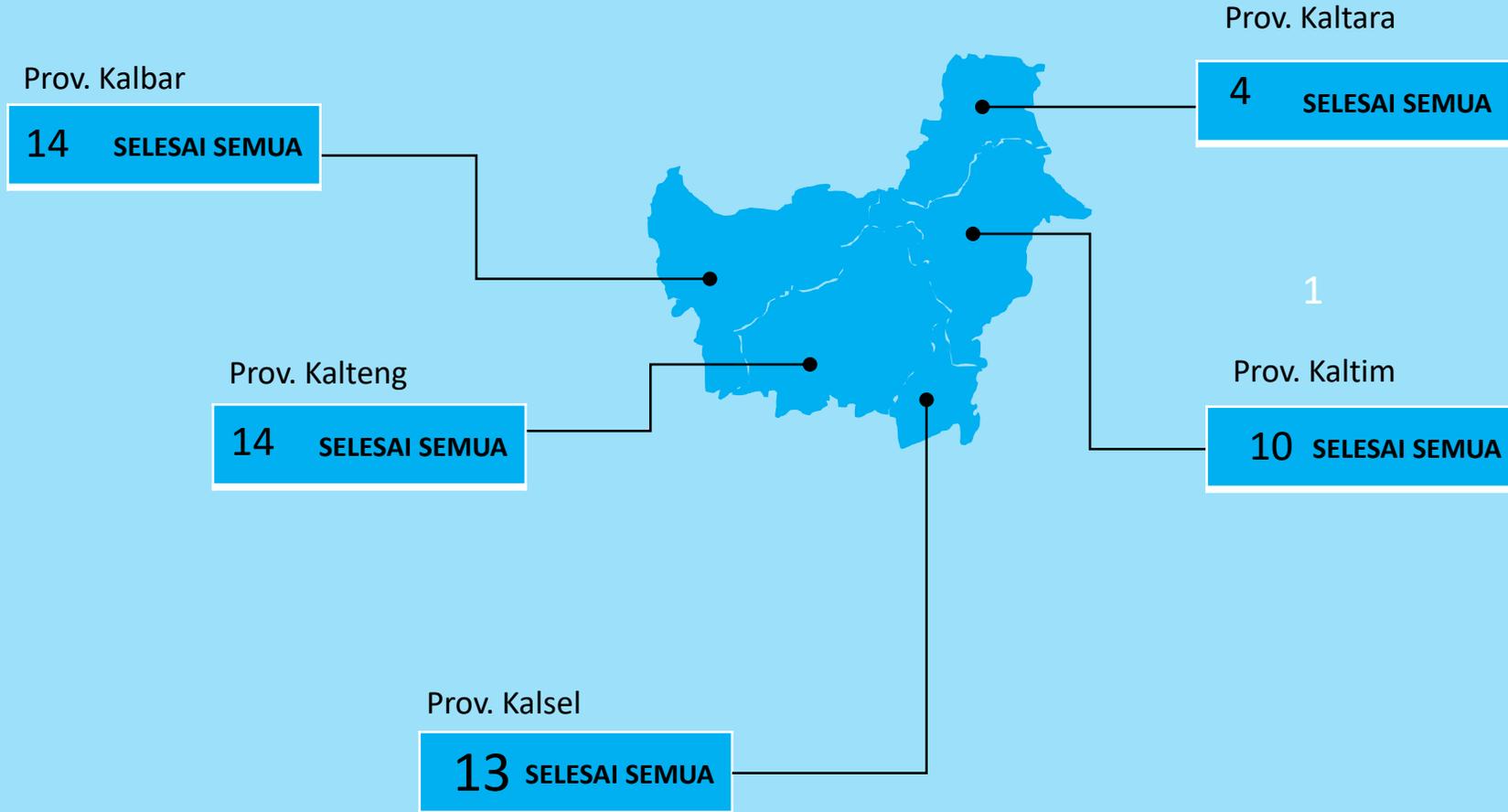
17 SELESAI SEMUA



DAERAH YANG BELUM MENYUSUN PERKADA

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

WILAYAH KALIMANTAN

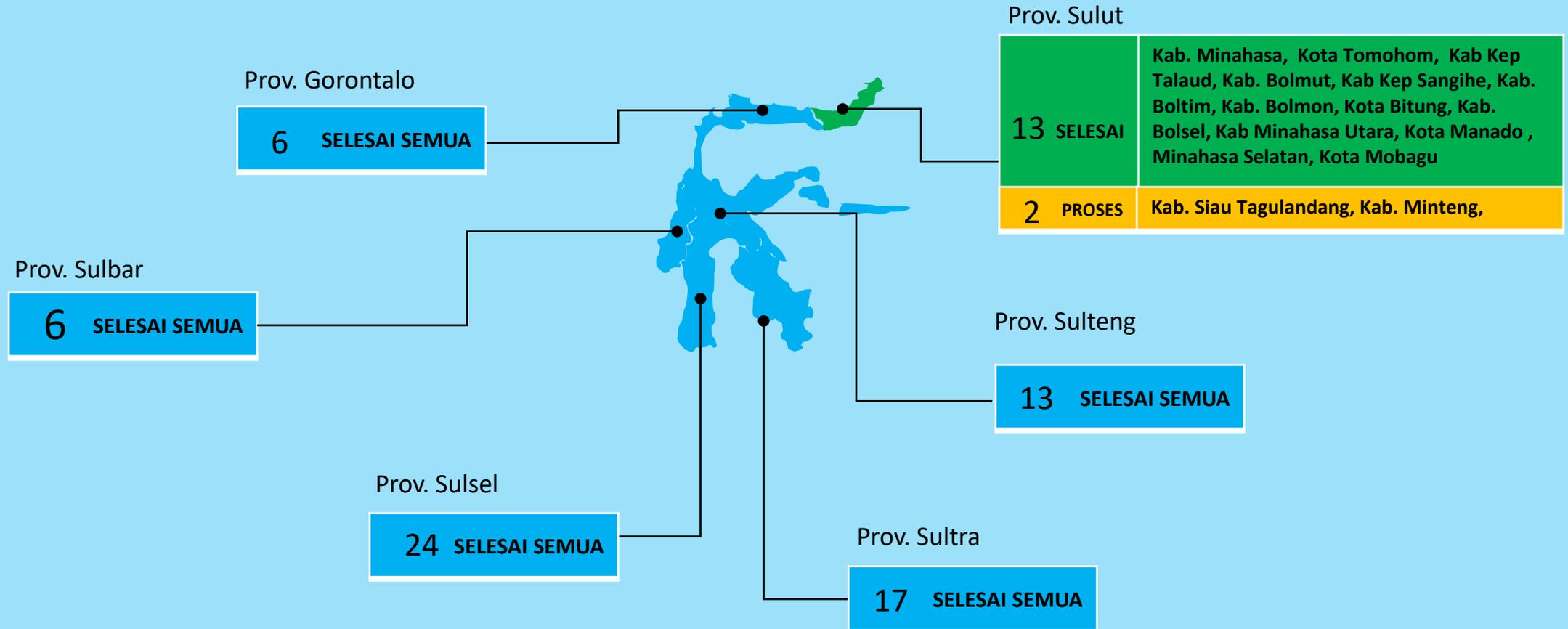




DAERAH YANG BELUM MENYUSUN PERKADA

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

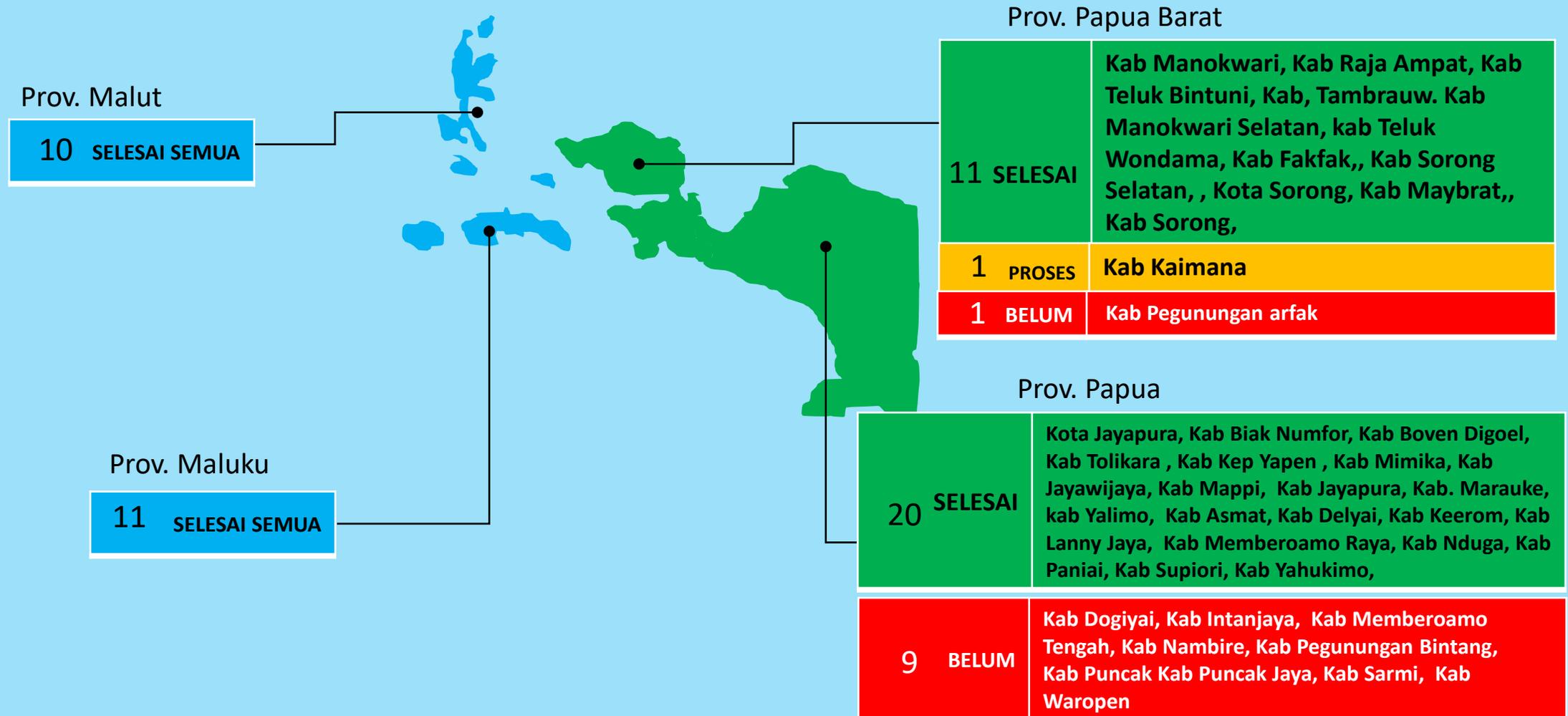
WILAYAH SULAWESI





DAERAH YANG BELUM MENYUSUN PERKADA
PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

WILAYAH MALUKU DAN PAPUA





**DATA PENYUSUNAN PERKADA TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
TANGGAL 18 OKTOBER 2020
PUKUL 21.30 WIB**

PILKADA 2020

Total:

309

Kab/Kota

48

KAB/KOTA MELAKSANAKAN
PILGUB DI 9 PROVINSI

224

KABUPATEN

37

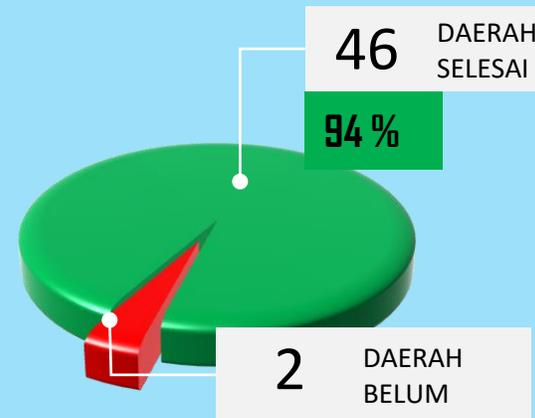
KOTA

DARI 9 PROVINSI
YANG MELAKSANAKAN PILKADA



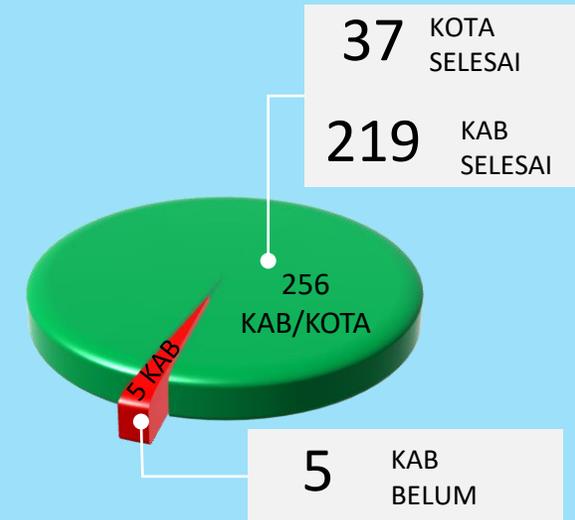
SELESAI : 9 PROVINSI
Jambi, Bengkulu, Kepri, Kaltara,
Kalteng, Kalsel, Sumbar, Sulut, dan
Sulteng

DARI 48 KAB/KOTA YANG TIDAK PILKADA
NAMUN PROVINSINYA MELAKSANAKAN PILKADA



BELUM : 2 DAERAH
Kab Minahasa Tenggara
Kab Siau Tagulandang

DARI 37 KOTA DAN 224 KAB
YANG MELAKSANAKAN PILKADA



BELUM : 5 KABUPATEN
Kaimana, Pegunungan Arfak, Nabire,
Pegunungan Bintang, Waropen



DATA SEBARAN PERKADA DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA



SUMATERA UTARA

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	SELESAI	TAPANULI SELATAN	SELESAI
	KOTA SIBOLGA	SELESAI	SIMALUNGUN	SELESAI
	KOTA PEMATANGSIANTAR	SELESAI	TOBA SAMOSIR	SELESAI
	KOTA TANJUNG BALAI	SELESAI	HUMBANG HASUNDUTAN	SELESAI
	KOTA BINJAI	SELESAI	SAMOSIR	SELESAI
	KOTA GUNUNGSITOLI	SELESAI	LABUHANBATU SELATAN	SELESAI
	KARO	SELESAI	LABUHANBATU UTARA	SELESAI
	ASAHAN	SELESAI	NIAS UTARA	SELESAI
	LABUHANBATU	SELESAI	NIAS	SELESAI
	MANDAILING NATAL	SELESAI	SERDANG BEDAGAI	SELESAI
	NIAS SELATAN	SELESAI	NIAS BARAT	SELESAI
	PAKPAK BHARAT	SELESAI		



DATA SEBARAN PERKADA DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA

PROVINSI SUMATERA UTARA, RIAU, KEPULAUAN RIAU, SUMSEL DAN JAMBI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
SUMATERA BARAT	SOLOK	SELESAI
	TANAH DATAR	SELESAI
	PADANG PARIAMAN	SELESAI
	AGAM	SELESAI
	KOTA SOLOK	SELESAI
	KOTA BUKITTINGGI	SELESAI
	PESISIR SELATAN	SELESAI
	SIJUNJUNG	SELESAI
	PASAMAN BARAT	SELESAI
	SOLOK SELATAN	SELESAI
	LIMA PULUH KOTA	SELESAI
	PASAMAN	SELESAI
	DHARMASRAYA	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
RIAU	PELALAWAN	SELESAI
	SIAK	SELESAI
	KUANTAN SINGINGI	SELESAI
	KOTA DUMAI	SELESAI
	INDRAGIRI HULU	SELESAI
	BENGKALIS	SELESAI
	ROKAN HULU	SELESAI
	ROKAN HILIR	SELESAI
	KEPULAUAN MERANTI	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	SELESAI
	BINTAN	SELESAI
	KOTA BATAM	SELESAI
	NATUNA	SELESAI
	LINGGA	SELESAI
	KEPULAUAN ANAMBAS	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	SELESAI
	TANJUNG JABUNG TIMUR	SELESAI
	KOTA SUNGAI PENUH	SELESAI
	BATANGHARI	SELESAI
	BUNGO	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	SELESAI
	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	SELESAI
	OGAN KOMERING ULU	SELESAI
	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SELESAI
	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SELESAI
	OGAN ILIR	SELESAI
	MUSI LAWAS UTARA	SELESAI



DATA SEBARAN PERKADA DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA

PROVINSI JATENG, BENGKULU, LAMPUNG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN JABAR

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
JAWA TENGAH	PURWOREJO	SELESAI
	SRAGEN	SELESAI
	GROBOGAN	SELESAI
	REMBANG	SELESAI
	DEMAK	SELESAI
	SEMARANG	SELESAI
	KENDAL	SELESAI
	KOTA MAGELANG	SELESAI
	KOTA SURAKARTA	SELESAI
	KOTA SEMARANG	SELESAI
	PURBALINGGA	SELESAI
	KEBUMEN	SELESAI
	WONOSOBO	SELESAI
	BOYOLALI	SELESAI
	KLATEN	SELESAI
	SUKOHARJO	SELESAI
	WONOGIRI	SELESAI
	BLORA	SELESAI
	PEKALONGAN	SELESAI
PEMALANG	SELESAI	
KOTA PEKOLNGAN	SELESAI	

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
BENGKULU	SELUMA	SELESAI
	BENGKULU SELATAN	SELESAI
	REJANG LEBONG	SELESAI
	BENGKULU UTARA	SELESAI
	KEPAHIANG	SELESAI
	MUKOMUKO	SELESAI
	KAUR	SELESAI
	LEBONG	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	SELESAI
	LAMPUNG TENGAH	SELESAI
	LAMPUNG TIMUR	SELESAI
	WAY KANAN	SELESAI
	PESISIR BARAT	SELESAI
	KOTA BANDAR LAMPUNG	SELESAI
	PESAWARAN	SELESAI
	KOTA METRO	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SELESAI
	BELITUNG TIMUR	SELESAI
	BANGKA TENGAH	SELESAI
	BANGKA BARAT	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
JAWA BARAT	BANDUNG	SELESAI
	KOTA DEPOK	SELESAI
	SUKABUMI	SELESAI
	CIANJUR	SELESAI
	TASIKMALAYA	SELESAI
	INDRAMAYU	SELESAI
	KARAWANG	SELESAI
	PANGANDARAN	SELESAI



DATA SEBARAN PERKADA DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA



PROVINSI JATIM, DIY, BANTEN, BALI, NTB DAN NTT

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
JAWA TIMUR	SIDOARJO	SELESAI
	TUBAN	SELESAI
	TRENGGALEK	SELESAI
	BLITAR	SELESAI
	KEDIRI	SELESAI
	MALANG	SELESAI
	JEMBER	SELESAI
	BANYUWANGI	SELESAI
	MOJOKERTO	SELESAI
	GRESIK	SELESAI
	KOTA BLITAR	SELESAI
	KOTA PASURUAN	SELESAI
	KOTA SURABAYA	SELESAI
	PACITAN	SELESAI
	PONOROGO	SELESAI
	SITUBONDO	SELESAI
	NGAWI	SELESAI
	LAMONGAN	SELESAI
	SUMENEP	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	SELESAI
	SLEMEN	SELESAI
	GUNUNGKIDUL	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
BANTEN	PANDEGLANG	SELESAI
	KOTA CILEGON	SELESAI
	KOTA TANGERANG SELATAN	SELESAI
	SERANG	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
BALI	JEMBRANA	SELESAI
	TABANAN	SELESAI
	BADUNG	SELESAI
	BANGLI	SELESAI
	KARANGASEM	SELESAI
	KOTA DENPASAR	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SELESAI
	LOMBOK UTARA	SELESAI
	KOTA MATARAM	SELESAI
	LOMBOK TENGAH	SELESAI
	DOMPU	SELESAI
	BIMA	SELESAI
	SUMBAWA BARAT	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
NUSA TENGGARA TIMUR	MENGGARAI	SELESAI
	MANGGARAI BARAT	SELESAI
	SUMBA TIMUR	SELESAI
	SUMA BARAT	SELESAI
	TIMOR TENGAH UTARA	SELESAI
	BELU	SELESAI
	NGADA	SELESAI
	SABU RAIJUA	SELESAI
	MALAKA	SELESAI



DATA SEBARAN PERKADA DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA

PROVINSI KALBAR, KALTENG, KALSEL, KALTIM DAN KALTARA

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	SELESAI
	KAPUAS HULU	SELESAI
	SAMBAS	SELESAI
	SINTANG	SELESAI
	BENGKAYANG	SELESAI
	MELAWI	SELESAI
	SEKADAU	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	SELESAI
	HULU SUNGAI TENGAH	SELESAI
	BALANGAN	SELESAI
	BANJAR	SELESAI
	TANAH BUMBU	SELESAI
	KOTA BANJARMASIN	SELESAI
	KOTA BANJARBARU	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	SELESAI
	KOTA SAMARINDA	SELESAI
	KOTA BONTANG	SELESAI
	PASER	SELESAI
	KUTAI KARTANEGARA	SELESAI
	BERAU	SELESAI
	KUTAI TIMUR	SELESAI
	MAHAKAM ULU	SELESAI
	KUTAI BARAT	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	SELESAI
	MALINAU	SELESAI
	NUNUKAN	SELESAI
	TANA TIDUNG	SELESAI



DATA SEBARAN PERKADA DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA

PROVINSI SULUT, SULTENG, SULTRA, SULSEL, SULBAR DAN GORONTALO

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN	SELESAI
	MINAHASA UTARA	SELESAI
	KOTA MANADO	SELESAI
	KOTA TOMOHON	SELESAI
	KOTA BITUNG	SELESAI
	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	SELESAI
	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
SULAWESI TENGGARA	BUTON UTARA	SELESAI
	MUNA	SELESAI
	KONAWE SELATAN	SELESAI
	WAKATOBI	SELESAI
	KONAWE UTARA	SELESAI
	KONAWE KEPULAUAN	SELESAI
KOLAKA TIMUR	SELESAI	

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
SULAWESI BARAT	MAMUJU	SELESAI
	MAJENE	SELESAI
	MAMUJU UTARA	SELESAI
	MAMUJU TENGAH	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	SELESAI
	POSO	SELESAI
	TOJO UNA-UNA	SELESAI
	MOROWALI UTARA	SELESAI
	KOTA PALU	SELESAI
	TOLITOLI	SELESAI
	SIGI	SELESAI
	BANGGAI LAUT	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
SULAWESI SELATAN	GOWA	SELESAI
	MAROS	SELESAI
	PENKAJENE DAN KEPULAUAN	SELESAI
	SOPPENG	SELESAI
	LUWU UTARA	SELESAI
	KOTA MAKASSAR	SELESAI
	KEPULAUAN SELAYAR	SELESAI
	BULUKUMBA	SELESAI
	BARRU	SELESAI
	TANA TORAJA	SELESAI
	LUWU TIMUR	SELESAI
	TORAJA UTARA	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
GORONTALO	GORONTALO	SELESAI
	BONE BOLANGO	SELESAI
	PAHUWATO	SELESAI



DATA SEBARAN PERKADA DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA

PROVINSI MALUKU, MALUKU UTARA, PAPUA BARAT, DAN PAPUA

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SELESAI
	SERAM BAGIAN TIMUR	SELESAI
	BURU SELATAN	SELESAI
	KEPULAUAN ARU	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	SELESAI
	HALMAHERA SELATAN	SELESAI
	HALMAHERA UTARA	SELESAI
	KOTA TERNATE	SELESAI
	HALMAHERA BARAT	SELESAI
	HALMAHERA TIMUR	SELESAI
	KEPULAUAN SULA	SELESAI
	PULAU TALIBU	SELESAI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
PAPUA BARAT	SORONG SELATAN	SELESAI
	MANOKWARI	SELESAI
	TELUK WONDAMA	SELESAI
	FAKFAK	SELESAI
	TELUK BINTUNI	SELESAI
	MANOKWARI SELATAN	SELESAI
	KAIMANA	PROSES
	RAJA AMPAT	SELESAI
	PEGUNUNGAN ARFAK	BELUM

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
PAPUA	YALIMO	SELESAI
	SUPIORI	SELESAI
	KEEROM	SELESAI
	NABIRE	BELUM
	MERAUKE	SELESAI
	PEGUNUNGAN BINTANG	BELUM
	BOVEN DIGOEL	SELESAI
	WAROPEN	BELUM
	YAHUKIMO	SELESAI
	ASMAT	SELESAI
MAMBERAMO RAYA	SELESAI	



DATA SEBARAN PERKADA DI KAB/KOYA YANG PROVINSINYA MELAKSANAKAN PILKADA

**Total:
48
DAERAH**

SELESAI: 46 DAERAH

BELUM: 2 DAERAH

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PERKADA
SUMBAR	KOTA PADANG	SELESAI	JAMBI	MUARO JAMBI	SELESAI	KALTENG	BARITO SELATAN	SELESAI	SULUT	BOLAANG MONGONDOW	SELESAI
	KOTA PADANG PANJANG	SELESAI		KOTA JAMBI	SELESAI		KOTAWARINGIN BARAT	SELESAI		MINAHASA	SELESAI
	KOTA PAYAKUMBUH	SELESAI		KERINCI	SELESAI		BARITO UTARA	SELESAI		MINAHASA TENGGARA	BELUM
	KOTA PARIAMAN	SELESAI		SOROLANGUN	SELESAI		SERUYAN	SELESAI		KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	BELUM
	KOTA SAWAHLUNTO	SELESAI		MERANGIN	SELESAI		GUNUNG MAS	SELESAI		KOTA KOTAMOBAGU	SELESAI
	KEPULAUAN MENTAWAI	SELESAI		TEBO	SELESAI		BARITO TIMUR	SELESAI		KEPULAUAN SANGIHE	SELESAI
BENGKULU	KOTA BENGKULU	SELESAI	KALSEL	TAPIN	SELESAI		KOTA PALANGKARAYA	SELESAI		KEPULAUAN TALAUD	SELESAI
	BENGKULU TENGAH	SELESAI		HULU SUNGAI UTARA	SELESAI		KAPUAS	SELESAI		BOLAANG MONGONDOW UTARA	SELESAI
KEPRI	KOTA TANJUNGPINANG	SELESAI		TANAH LAUT	SELESAI		KATINGAN	SELESAI			
KALTARA	KOTA TARAKAN	SELESAI		BARITO KUALA	SELESAI		PULANG PISAU	SELESAI			
SULTENG	DONGGALA	SELESAI		HULU SUNGAI SELATAN	SELESAI		LAMANDAU	SELESAI			
	BUOL	SELESAI		TABALONG	SELESAI		MURUNG RAYA	SELESAI			
	MOROWALI	SELESAI			SUKAMARA	SELESAI					
	BANGGAI KEPULAUAN	SELESAI									
	PARIGI MOUTONG	SELESAI									

RAPAT KOORDINASI

PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGELOMPOKAN COVID-19
DALAM RANGKA SUKSES PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DAN DEKLARASI NETRALITAS
TIMOR LESTE KABUPATEN NGANDARAN

**Update Data Pelaksanaan
Rakor Peningkatan Disiplin Dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Di 270 Daerah Yang
Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020**



SEBARAN PELAKSANAAN RAKOR PROVINSI & KAB/KOTA



PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

PILKADA 2020

Total:
309
Kab/Kota

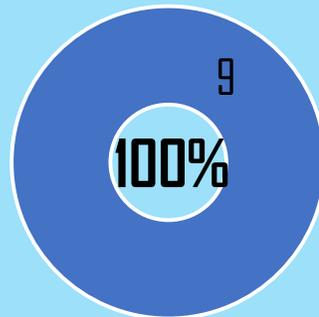
DARI **309 DAERAH**
YANG MELAKSANAKAN
PILKADA **270** SUDAH
MELAKSANAKAN RAKOR
(87 %)



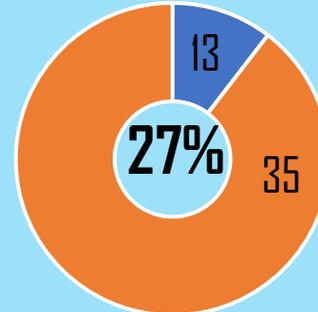
48
KAB/KOTA MELAKSANAKAN
PILGUB DI 9 PROVINSI

224
KABUPATEN
37
KOTA

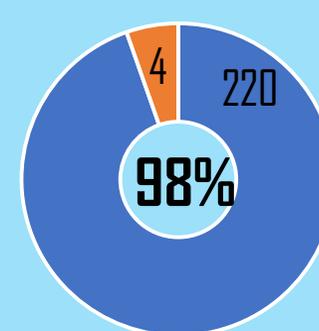
PROVINSI



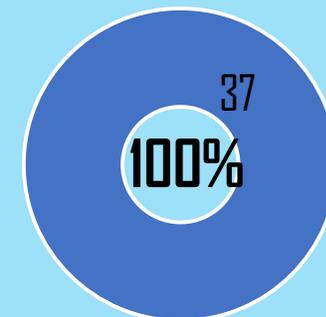
KAB/KOTA MELAKSANAKAN PILGUB DI 9 PROVINSI



KABUPATEN



KOTA



KETERANGAN

- SUDAH RAKOR
- BELUM RAKOR

* Update Data Hari Rabu, 20 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB
Sumber Data Google form, Grup WhatsApp dan Data Polri

* Update Pelaksanaan Rakor di 48 Kabupaten/Kota tersebut masih
dalam tahapan konfirmasi dan telah dikirimkan surat susulan

SEBARAN PELAKSANAAN RAKOR PROVINSI

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020



 PROVINSI YANG SUDAH RAKOR

 PROVINSI YANG BELUM RAKOR

SEBARAN PELAKSANAAN RAKOR PROVINSI & KAB/KOTA



PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

SUMUT

1. Kabupaten Pakpak Bharat
2. Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Kabupaten Mandailing Natal
4. Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Kabupaten Nias
6. Kabupaten Nias Utara
7. Kabupaten Nias Barat
8. Kabupaten Nias Selatan
9. Kabupaten Labuhanbatu
10. Kabupaten Toba Samosir
11. Kabupaten Serdang Bedagai
12. Kota Binjai
13. Kabupaten Simalungun
14. Kabupaten Asahan
15. Kota Tanjung Balai
16. Kabupaten Karo
17. Kabupaten Labuhanbatu Utara
18. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
19. Kabupaten Samosir
20. Kota Sibolga
21. Kota Gunung Sitoli
22. Kota Pematang Siantar
23. Kota Medan

KEP. RIAU

1. Kab Lingga
2. Kab Natuna
3. Kab Kepulauan Anambas
4. Kab Bintan
5. Kab Karimun
6. Kota Batam

JAMBI

1. Kota Sungai Penuh
2. Kab Bungo
3. Kab Tanjung Jabung Barat
4. Kab Batanghari
5. Kab Tanjung Jabung Timur

RIAU

1. Kab Rokan Hilir
2. Kab Rokan Hulu
3. Kab Siak
4. Kab Kepulauan Meranti
5. Kab Indragiri Hulu
6. Kab Bengkalis
7. Kab Kuatan Singingi
8. Kab Pelalawan
9. Kota Dumai

BABEL

1. Kab Bangka Tengah
2. Kab Belitung Timur
3. Kab Bangka Barat
4. Kab Bangka Selatan

SUMBAR

1. Kota Solok
2. Kab Pasaman Barat
3. Kab Padang Pariaman
4. Kab Limapuluh Kota
5. Kab Tanah Datar
6. Kab Pesisir Selatan
7. Kota Bukittinggi
8. Kab Solok
9. Kab Agam
10. Kab Pasaman
11. Kab Dharmasraya
12. Kab Solok Selatan
13. Kab Sijunjung

BANTEN

1. Kab Serang
2. Kab Pandeglang
3. Kota Cilegon
4. Kota Tangerang Selatan

BENGKULU

1. Kab Lebong
2. Kab Seluma
3. Kab Kaur
4. Kab Mukomuko
5. Kab Bengkulu Selatan
6. Kab Rejang Lebong
7. Kab Kepahiang
8. Kab Bengkulu Utara

LAMPUNG

1. Kab Lampung Timur
2. Kota Metro
3. Kab Way Kanan
4. Kab Lampung Selatan
5. Kab Lampung Tengah
6. Kab Pesawaran
7. Kab Pesisir Barat
8. Kota Bandar Lampung

SUMSEL

1. Kab Ogan Komering Ulu
2. Kab Ogan Komering Ulu Selatan
3. Kab Ogan Ilir
4. Kab Ogan Komering Ulu Timur
5. Kab Musi Rawas
6. Kab Musirawas Utara
7. Kab Penukal Abab Lematang Ilir

JATENG

1. Kab Pekalongan
2. Kab Kebumen
3. Kab Purbalingga
4. Kab Blora
5. Kab Wonosobo
6. Kab Wonogiri
7. Kab Purworejo
8. Kab Sragen
9. Kab Pemaslang
10. Kota Pekalongan
11. Kab Semarang
12. Kab Rembang
13. Kab Boyolali
14. Kab Kendal
15. Kab Sukoharjo
16. Kab Klaten
17. Kab Grobogan
18. Kota Magelang
19. Kota Surakarta
20. Kab Demak
21. Kota Semarang

JATIM

1. Kab Ngawi
2. Kab Jember
3. Kab Ponorogo
4. Kab Banyuwangi
5. Kab Lamongan
6. Kab Blitar
7. Kab Situbondo
8. Kab Kediri
9. Kab Sumenep
10. Kab Pacitan
11. Kab Trenggalek
12. Kab Tuban
13. Kota Blitar
14. Kota Pasuruan
15. Kab Gresik
16. Kab Malang
17. Kab Mojokerto
18. Kab Sidoarjo
19. Kota Surabaya

DIY

1. Kab Gunung Kidul
2. Kab Bantul
3. Kab Sleman

JABAR

1. Kab Sukabumi
2. Kab Bandung
3. Kab Indramayu
4. Kab Cianjur
5. Kab Tasikmalaya
6. Kab Karawang
7. Kab Pangandaran
8. Kota Depok



KETERANGAN

 SUDAH RAKOR

 BELUM RAKOR

SEBARAN PELAKSANAAN RAKOR PROVINSI & KAB/KOTA



PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

KALBAR

1. Kab Kapuas hulu
2. Kab Ketapang
3. Kab Bengkayang
4. Kab Sintang
5. Kab Sambas
6. Kab Sekadau
7. Kab Melawi

KALSEL

1. Kab Hulu Sungai Tengah
2. Kab Tanah Bumbu
3. Kab Banjar
4. Kab Kotabaru
5. Kab Balangan
6. Kota Banjarmasin
7. Kota Banjarbaru

SULBAR

1. Kab Majene
2. Kab Mamuju Utara
3. Kab Mamuju
4. Kab Mamuju Tengah

SULUT

1. Kab Bolmong Timur
2. Kab Bolmong Selatan
3. Kab Minahasa Utara
4. Kab Minahasa Selatan
5. Kota Tomohon
6. Kota Bitung
7. Kota Manado

SULSEL

1. Kab Tana Toraja
2. Kab Kepulauan Selayar
3. Kab Pangkajene Kepulauan
4. Kab Barru
5. Kab Maros
6. Kab Luwu Timur
7. Kab Luwu Utara
8. Kab Bulukumba
9. Kab Toraja Utara
10. Kota Makasar
11. Kab Gowa
12. Kab Soppeng

GORONTALO

1. Kab Pohuwato
2. Kab Bone Bolango
3. Kab Gorontalo

MALUT

1. Kab Pulau Taliabu
2. Kab Kepulauan Sula
3. Kab Halmahera Selatan
4. Kab Halmahera Timur
5. Kab Halmahera Barat
6. Kota Ternate
7. Kota Tidore Kepulauan
8. Kab Halmahera Utara

KALTENG

1. Kab Kotawaringin Timur

KALTARA

1. Kab Malinau
2. Kab Bulungan
3. Kab Nunukan
4. Kab Tana Tidung

KALTIM

1. Kab Mahakam Ulu
2. Kab Kutai Kartanegara
3. Kab Berau
4. Kota Samarinda
5. Kota Bontang
6. Kab Paser
7. Kab Kutai Timur
8. Kab Kutai Barat
9. Kota Balikpapan

SULTRA

1. Kab Konawe Kepulauan
2. Kab Konawe Selatan
3. Kab Muna
4. Kab Wakatobi
5. Kab Buton Utara
6. Kab Konawe Utara
7. Kab Kolaka Timur

BALI

1. Kab Badung
2. Kab Tabanan
3. Kab Jembrana
4. Kota Denpasar
5. Kab Bangli
6. Kab Karang Asem

SULTENG

1. Kab Tojo Una-una
2. Kab Poso
3. Kab Toli-toli
4. Kab Sigi
5. Kab Banggai Laut
6. Kab Morowali Utara
7. Kota Palu
8. Kab Banggai

NTT

1. Kab Sumba Barat
2. Kab Ngada
3. Kab Belu
4. Kab Timor Tengah Utara
5. Kab Sabu Raijua
6. Kab Malaka
7. Kab Manggarai Barat
8. Kab Sumba Timur
9. Kab Manggarai

NTB

1. Kab Bima
2. Kab Dompu
3. Kab Sumbawa Barat
4. Kab Sumbawa
5. Kab Lombok Utara
6. Kab Lombok Tengah
7. Kota Mataram

PABAR

1. Kab Sorong Selatan
2. Kab Pegunungan Arfak
3. Kab Teluk Wondama
4. Kab Manokwari Selatan
5. Kab Manokwari
6. Kab Fakfak
7. Kab Raja Ampat
8. Kab Kaimana
9. Kab Teluk Bintuni



KETERANGAN

 SUDAH RAKOR

 BELUM RAKOR

PELAKSANAAN RAKOR PADA KAB/KOTA DI 9 PROVINSI YANG MELAKSANAKAN PILKDA SERENTAK TAHUN 2020



PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

SUMBAR

1. Kota Padang
2. Kota Padang Panjang
3. Kota Payakumbuh
4. Kota Pariaman
5. Kota Sawahlunto
6. Kepulauan Mentawai

BENGKULU

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah

KEP. RIAU

1. Kota Tanjung Pinang

JAMBI

1. Kabupaten Muaro Jambi
2. Kota Jambi
3. Kabupaten Kerinci
4. Kabupaten Sorolangun
5. Kabupaten Merangin
6. Kabupaten Tebo

KALTARA

1. Kota Tarakan

KALSEL

1. Kabupaten Tapin
2. Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Kabupaten Tanah Laut
4. Kabupaten Barito Kuala
5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Kabupaten Tabalong

SULUT

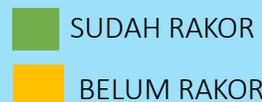
1. Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kabupaten Minahasa
3. Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
5. Kota Kotamobagu
6. Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Kabupaten Kepulauan Talaud
8. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

KALTENG

1. Kabupaten Barito Selatan
2. Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kabupaten Barito Utara
4. Kabupaten Seruyan
5. Kabupaten Gunung Mas
6. Kabupaten Barito Timur
7. Kabupaten Kota Palangkaraya
8. Kabupaten Kapuas
9. Kabupaten Katingan
10. Kabupaten Pulang Pisau
11. Kabupaten Lamandau
12. Kabupaten Murung Raya
13. Kabupaten Sukamara

SULTENG

1. Kabupaten Donggala
2. Kabupaten Buol
3. Kabupaten Morowali
4. Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kabupaten Parigi Moutong



PELAKSANAAN RAKOR PADA KAB/KOTA DI 9 PROVINSI YANG MELAKSANAKAN PILGUB TAHUN 2020



PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

KEMENDAGRI JUGA MENDORONG PELAKSANAAN RAKOR PADA 48 KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN/KOTA NAMUN MELAKSANAKAN PILKADA TINGKAT PROVINSI PADA TAHUN 2020

1. SUMATERA BARAT
2. JAMBI
3. BENGKULU
4. KALIMANTAN SELATAN
5. SULAWESI UTARA
6. KEPULAUAN RIAU
7. KALIMANTAN TENGAH
8. SULAWESI TENGAH
9. KALIMANTAN UTARA

1. Kota Padang
2. Kota Padang Panjang
3. Kota Payakumbuh
4. Kota Pariaman
5. Kota Sawahlunto
6. Kepulauan Mentawai
7. Kabupaten Kota Bengkulu
8. Kabupaten Bengkulu Tengah
9. Kota Tanjung Pinang
10. Kota Tarakan
11. Kabupaten Donggala
12. Kabupaten Buol
13. Kabupaten Morowali
14. Kabupaten Banggai Kepulauan
15. Kabupaten Parigi Moutong
16. Kabupaten Muaro Jambi
17. Kota Jambi
18. Kabupaten Kerinci
19. Kabupaten Sorolangun
20. Kabupaten Merangin
21. Kabupaten Tebo
22. Kabupaten Tapin
23. Kabupaten Hulu Sungai Utara
24. Kabupaten Tanah Laut
25. Kabupaten Barito Kuala
26. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
27. Kabupaten Tabalong
28. Kabupaten Barito Selatan
29. Kabupaten Kotawaringin Barat
30. Kabupaten Barito Utara
31. Kabupaten Seruyan
32. Kabupaten Gunung Mas
33. Kabupaten Barito Timur
34. Kabupaten Kota Palangkaraya
35. Kabupaten Kapuas
36. Kabupaten Katingan
37. Kabupaten Pulang Pisau
38. Kabupaten Lamandau
39. Kabupaten Murung Raya
40. Kabupaten Sukamara
41. Kabupaten Bolaang Mongondow
42. Kabupaten Minahasa
43. Kabupaten Minahasa Tenggara
44. Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
45. Kota Kotamobagu
46. Kabupaten Kepulauan Sangihe
47. Kabupaten Kepulauan Talaud
48. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

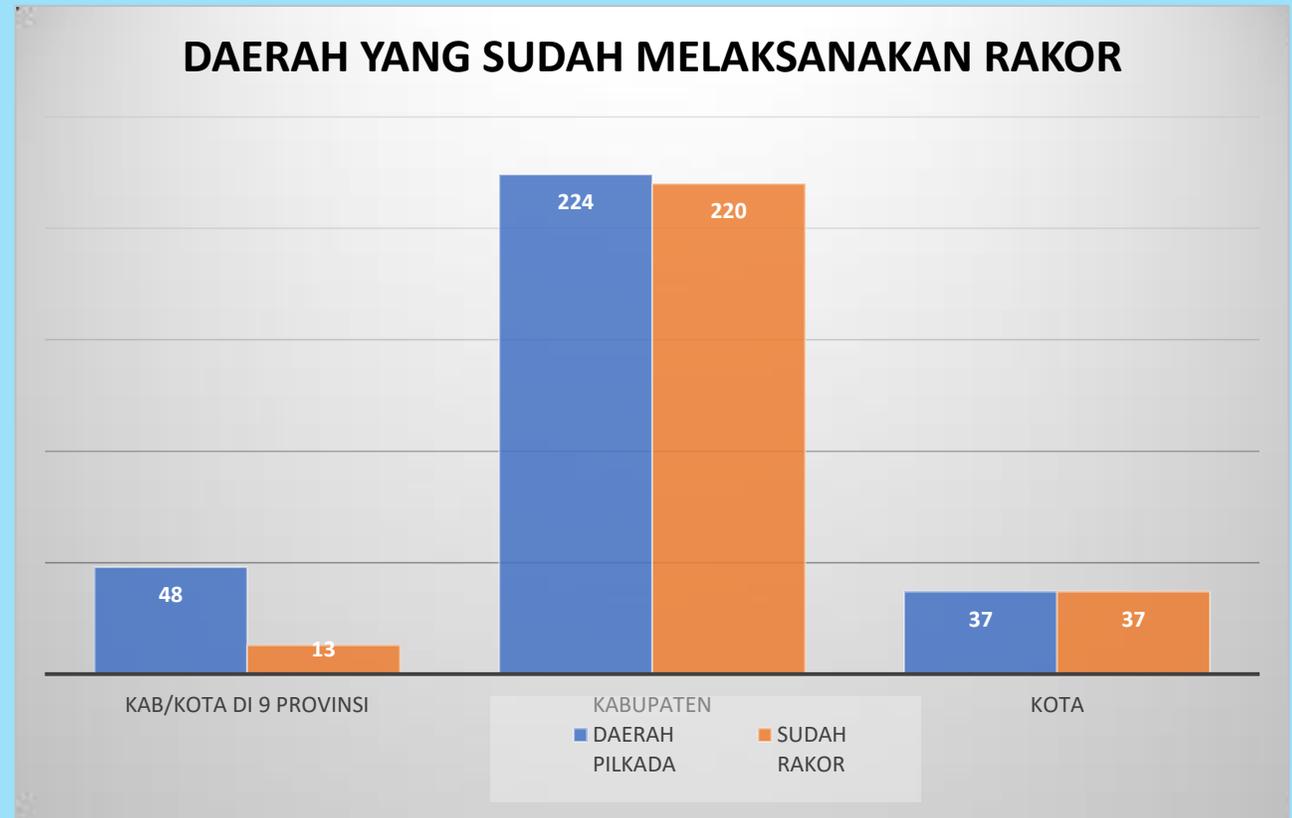


SEBARAN PELAKSANAAN RAKOR PROVINSI & KAB/KOTA

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

TABEL PELAKSANAAN RAKOR

TINGKATAN	JUMLAH	
	DAERAH PILKADA	SUDAH RAKOR
KAB/KOTA YANG MELAKSANAKAN PILGUB	48	13
KABUPATEN	224	220
KOTA	37	37
JUMLAH	309	270



DARI 309 DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA 270 DAERAH SUDAH MELAKSANAKAN RAKOR (87%)

* Update Data Hari Rabu, 20 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB
Sumber Data Google form, Grup WhatsApp dan Data Polri



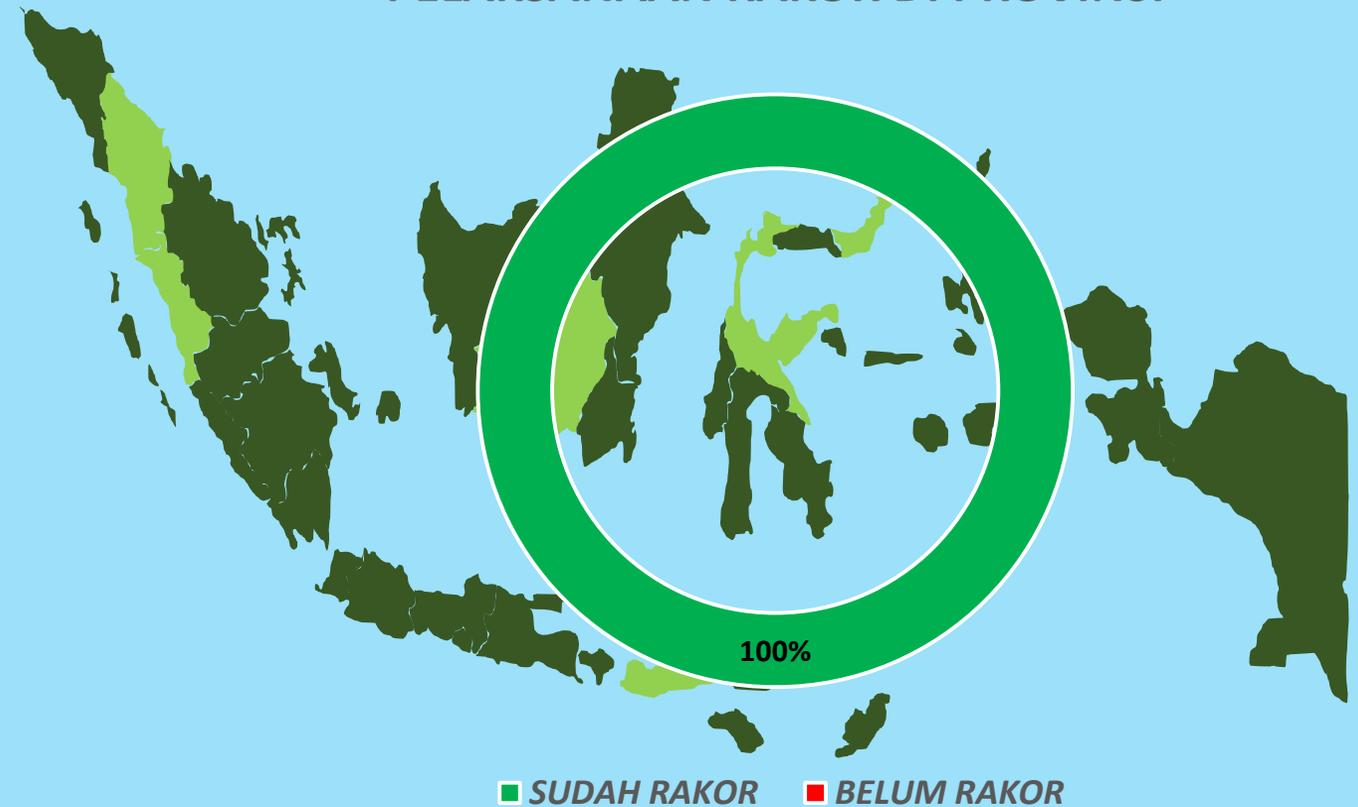
SEBARAN PELAKSANAAN RAKOR PROVINSI

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

DAFTAR PROVINSI YANG SUDAH MELAKSANAKAN RAKOR:

1. SUMATERA BARAT
2. JAMBI
3. BENGKULU
4. KALIMANTAN SELATAN
5. SULAWESI UTARA
6. KEPULAUAN RIAU
7. KALIMANTAN TENGAH
8. SULAWESI TENGAH
9. KALIMANTAN UTARA

PELAKSANAAN RAKOR DI PROVINSI



Semua Provinsi Telah Melaksanakan Rakor

* Update Data Hari Rabu, 20 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB
Sumber Data Google form, Grup WhatsApp dan Data Polri

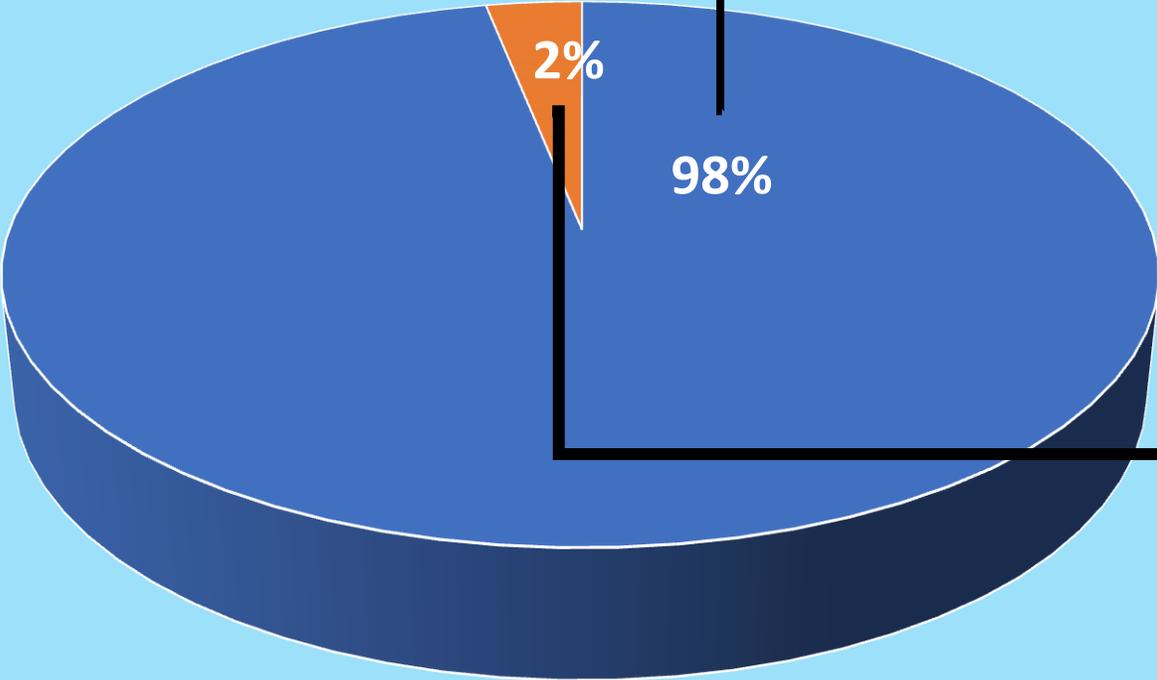


SEBARAN PELAKSANAAN RAKOR KABUPATEN

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020



PELAKSANAAN RAKOR DI KABUPATEN



220 KABUPATEN SUDAH MELAKSANAKAN RAKOR

- KAB. BELUM RAKOR**
1. Kab Supiori
 2. Kab Membramo Raya
 3. Kab Pegunungan Bintang
 4. Kab Yahukimo

4 KABUPATEN BELUM MELAKSANAKAN RAKOR

Dari **224 Kabupaten** yang Melaksanakan Pilkada Serentak **220 Kab Sudah** Melaksanakan Rakor dan **4 Kab. Belum** Melaksanakan Rakor

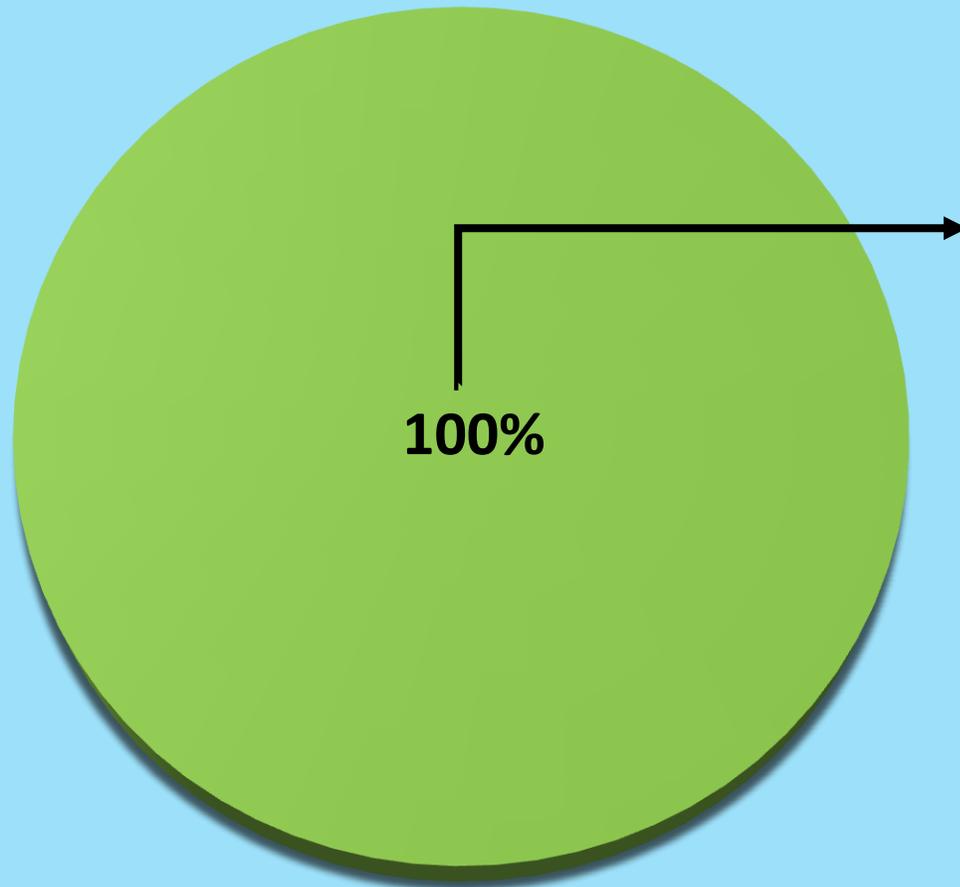
* Update Data Hari Rabu, 20 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB
Sumber Data Google form, Grup WhatsApp dan Data Polri

SEBARAN PELAKSANAAN RAKOR KOTA

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020



PELAKSANAAN RAKOR DI KOTA

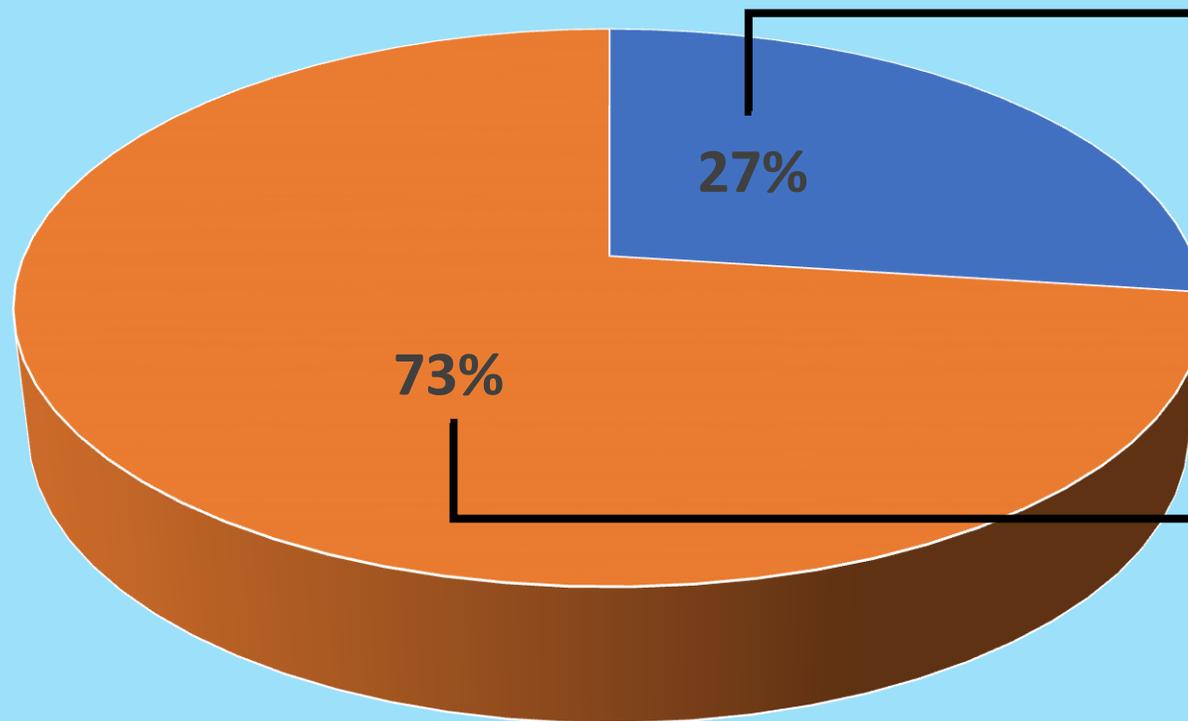


**37 KOTA YANG MELAKSANAKAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2020 SEMUA SUDAH
MELAKSANAKAN RAKOR**

SEBARAN PELAKSANAAN RAKOR PADA KAB/KOTA DI 9 PROVINSI YANG MELAKSANAKAN PILGUB TAHUN 2020

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

PELAKSANAAN RAKOR DI KAB/KOTA
PADA 9 PROVINSI PILKADA



13 KAB/KOTA SUDAH
MELASANAKAN RAKOR

35 KOTA BELUM
MELAKSANAKAN RAKOR

■ SUDAH RAKOR ■ BELUM RAKOR

Dari **48 Kab/Kota** di **9 Provinsi** yang Melaksanakan Pilkada Serentak **13 Kab/Kota Sudah** Melaksanakan Rakor dan **35 kab/Kota Belum** Melaksanakan Rakor



APRESIASI DAN PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI DAERAH
SESUAI INPRES 6/2020 & INMENDAGRI 4/2020

Kemendagri Memberikan Apresiasi Terdapat **8 (Delapan) Provinsi** Yang *Sangat Responsive Dan Cepat* Dalam Menindaklanjuti Inpres Dan Inmendagri Dalam **Bentuk Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi** Di Provinsi Dan Mengkoordinir Kabupaten/Kota Di Wilayahnya.

KEPADA GUBERNUR PROVINSI:

Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo; dan Maluku.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 September 2020

Yth. Gubernur Maluku

di-

Ambon

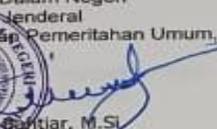
Nomor : 188.134/4379/Polpum
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Apresiasi Penyusunan Perkada
dan Pelaksanaan Rakor

Berkenaan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka setiap daerah diharapkan dapat menindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dalam penerapannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Saudara yang telah berhasil mendorong penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* untuk Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi serta memutus rantai penularan wabah *Covid-19*.
2. Diharapkan kepada Saudara Gubernur untuk dapat memberikan apresiasi dan penghargaan serupa kepada Bupati/Walikota (*daftar terlampir*) yang telah selesai menyusun Peraturan Kepala Daerah dan melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,
Menteri Dalam Negeri
Ditandatangani oleh
Menteri Dalam Negeri
Politik dan Pemerintahan Umum,
Drs. Drs. Santiar, M.Si



Tembusan:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
4. Yth. Sekretaris Kabinet;
5. Yth. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia
8. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
11. Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

Dokumentasi Kegiatan



J. DOKUMENTASI KEGIATAN GAKUM DI BEBERAPA DAERAH JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020







Terima Kasih

